

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan (superior) kepada bawahannya (subordinates). Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Anggaran belanja merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Dan anggaran belanja digunakan sebagai alat kebijakan di bidang fiskal disamping fungsinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah digunakan sebagai pendorong perekonomian secara agregat disaat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya. Belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal dan berfungsi sebagai bentuk intervensi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan

ekonomi. Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis melalui berbagai pendekatan fleksibilitas

maupun mengurangi jalur birokrasi untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada kementerian/lembaga. Dengan langkah tersebut diharapkan belanja APBN dapat lebih berdampak terhadap perekonomian khususnya pada sektor riil, sehingga APBN dapat lebih tercermin sebagai fungsi stabilisasi dan distribusi.¹

Perencanaan adalah formulasi terinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan pengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.² Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Perencanaan anggaran yang tidak akurat juga mengakibatkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilakukan revisi, sebelum pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Kegiatan dan program juga belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran. Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang

¹ Wieske Anneleen Ratag, dkk, Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 20, No. 3 (2019) : 75.

² R. Agoes Kamaroellah, *Akuntansi Manajemen Pendidikan*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) , 6.

berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.³

Penyerapan anggaran juga akan mengalami keterlambatan bila perencanaan kegiatan kurang matang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan tidak sesuai perencanaannya. Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran.

Hal lain, disamping perencanaan anggaran yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran, lambatnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja seperti: lambatnya penunjukan tenaga pengelola keuangan, kebiasaan menunda pekerjaan dan tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pengelolaan anggaran satuan kerja. Kedua, proses pengadaan barang/jasa. Kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa dalam mengambil tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa, keengganan pegawai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdampak terhadap lambatnya penyerapan anggaran. Ketiga,

³ Wieske Anneleen Ratag, dkk, 76.

mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” Ketentuan ini menegaskan bahwa persyaratan utama dapat dilakukan pembayaran adalah telah diterimanya barang dan/atau jasa yang diperjanjikan antara PPK dan penyedia barang/jasa. Namun kadang kala pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa juga mengalami kelambatan yang dapat juga disebabkan karena pihak penyedia tidak mengajukan tagihan atau karena dokumen bukti tagihan yang diserahkan pihak penyedia tidak lengkap. Selain itu, perencanaan kas yang tidak akurat, mengakibatkan satuan kerja tidak memiliki pedoman yang tepat kapan anggaran akan direalisasikan, sehingga proses pencairan anggaran menjadi terlambat.⁴

Perencanaan Anggaran merupakan proses penyusunan rencana kegiatan anggaran yang tepat untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran merupakan salah satu Langkah penting dalam pengelolaan anggaran. maka dari itu aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja.⁵

Pelaksanaan Anggaran merupakan tahap pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua

⁴ Wieske Anneleen Ratag, dkk, 79-80.

⁵Vety Yuliani, Skripsi : “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 Pada UPTD Puskesmas Di Kabupaten Tegal”, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal, 2020), 19-20.

rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan dalam internal satuan perangkat kerja, serta suatu proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Pelaksanaan juga dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat penyerapan anggaran.⁶

Pengawasan Anggaran dilakukan dengan cara memanfaatkan angka-angka di dalam anggaran pendapatan dan belanja untuk tujuan pengawasan. Tindakannya berupa membandingkan apa yang telah dicapai dalam masing-masing kategori mata anggaran selama waktu tertentu dengan angka yang sudah direncanakan dalam anggaran belanja. Teknik pengawasan anggaran belanja ini memungkinkan administrator dan manajer untuk mengadakan pengecekan yang berkesinambungan dan memecahkan masalah yang ada secara dini.⁷ Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.⁸

Penyerapan Anggaran merupakan suatu pencapaian dari estimasi yang hendak ingin dicapai dalam dalam satu periode tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah bagi orang-orang awam menyebutnya yaitu sebagai pencairan anggaran. Untuk memperbaiki penyerapan anggaran maka penting dilakukan sebuah perencanaan anggaran yang baik,

⁶ Fauziah, Tesis “*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju*”, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021), 9.

⁷ Ari Prasetyo, *Pengantar Manajemen Islami*, 210.

⁸ Marhan Hasibuan, *Pembiayaan Pendidikan*, (Sumatera Utara : STAI-JM Press, 2022), 68.

pelaksanaan yang tepat sasaran, dan pengawasan harus dimaksimalkan dengan baik sehingga berdampak baik pada perbaikan dalam penyerapan anggaran.⁹

Dalam mencapai tujuannya diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Untuk itu perlu menyusun suatu anggaran. Anggaran merupakan titik fokus dari keseluruhan proses perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, anggaran harus terorganisasi, rapi, jelas, komperhensif serta disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini. Anggaran sebagai alat manajemen dibidang perencanaan dan pengawasan ternyata tidak begitu saja dapat diperoleh manfaatnya secara penuh dan berimbang oleh Kementerian/Lembaga yang telah menggunakannya tanpa ada usaha khusus dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Penganggaran tidak lain adalah proses menentukan siapa yang bertanggung jawab. Perencanaan yang baik bukan saja harus mempunyai tujuan dan konsistensi, tetapi juga harus dilakukan pengawasan secara terus menerus. Perencanaan pasti mengharapkan bahwa apa yang direncanakan itu dapat memenuhi sasaran dalam waktu dan biaya yang telah tentukan. Salah satu langkah strategis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran dengan cara pengawasan.¹⁰

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

⁹ Fauziah, 8.

¹⁰ Wieske Anneleen Ratag, dkk, 79-80.

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.¹¹

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur kembali mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut di peruntukkan untuk pekerjaan pembagunan pengelolaan dan pengembangan Spam daerah Kabupaten / Kota.

Namun untuk di tahun ini, anggaran dari pemerintah pusat relatif ada penurunan berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk di tahun sebelumnya, DPRKP mendapatkan anggaran DAK sebesar 10,4 Milyar. Sedangkan di tahun anggaran 2022 ini DPRKP Kabupaten Sampang hanya memperoleh dana sebesar 5 Milyar yakni DAK Penugasan.

Penurunan anggaran DAK tersebut murni wewenang dari pemerintah pusat, Dan dinas hanya sebatas mengusulkan. Anggaran 5 Milyar yang ada di DPRKP dibagi menjadi 19 paket pekerjaan yang tersebar di beberapa Kecamatan yakni kecamatan Omben, Camplong, Torjun, Tambelangan, Robatal Serta Kecamatan karang penang dan kecamatan ketapang. Setiap paket kegiatan anggaran yang di alokasikan tidak sama tergantung kebutuhan yang ada di lapangan. Tetapi rata-rata perpaket nilainya mencapai 250 Juta, dan pelaksana kegiatan di lapangan sama seperti tahun sebelumnya yakni menggunakan pihak (red-Cv) dan juga consultans Pengawas.¹²

¹¹<https://sampangkab.go.id/dinas-perumahan-rakyat-dan-kawasan-pemukiman/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pada pukul 9.24.

¹² Lono, *Program Pembagunan / Pengelolaan Dan Pengembangan Spam DPRKP Kabupaten Sampang Kecipratan Dana 5 Milyar*, <https://dorronlinenews.com/2022/06/judulprogram->

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang berbagai pengaruh perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran terhadap penyerapan anggaran menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten.

Yakni, menurut Farhan Bayu Putra, dkk , dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau) menyatakan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.¹³ Sedangkan Andarias Patiran dan Melyanus Bonsapia dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura) menyatakan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, pengawasan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.¹⁴

[pembangunan-pengelolaan-dan-pengembangan-spam-dprkp-kabupaten-sampang-kecipratan-dana-5-milyar/](#). Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pada pukul 9.32.

¹³Farhan Bayu Putra, dkk, Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau), *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 14, No. 2, (November 2021) : 221.

¹⁴Andarias Patiran dan Melyanus Bonsapia, Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura), *Jurnal Ilmiah Ekonomi* (2018) : 19.

Dari berbagai variabel independen yang digunakan diatas, peneliti menggunakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran dalam melihat pengaruh terhadap penyerapan anggaran. karena peneliti menduga yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampang ialah ketiga variabel tersebut.

Perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.¹⁵ Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih ada anggapan bahwa tidak semua perencanaan anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasiannya.¹⁶ Hal ini berarti semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinan dkk yang menyebutkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh dengan arah positif terhadap penyerapan anggaran.¹⁷

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksana anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, untuk menghasilkan realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan.¹⁸ Hal ini

¹⁵ Ferdinan, dkk ,121.

¹⁶ Wieske Anneleen Ratag, dkk, Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 20, No. 3 (2019) : 79.

¹⁷ Ferdinan, dkk , 130.

¹⁸Vety Yuliani, Skripsi : “*Pengaruh Perencanaan Anggaran,Pelaksanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peneyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 Pada UPTD Puskesmas Di Kabupaten Tegal*”, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal, 2020), 21.

semakin baik pelaksanaan anggaran maka semakin baik pula penyerapan anggaran, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah yang menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.¹⁹

Pengawasan anggaran merupakan suatu bentuk Tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.²⁰ Dengan adanya pelaksanaan pengawasan maka akan membantu untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga akan meningkatkan kinerja nya.²¹ Hal ini semakin baik pengawasan anggaran maka semakin baik pula penyerapan anggaran, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Melyanus Bonsapia yang menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.²²

Pada penelitian kali ini adalah tentang penyerapan anggaran dimana peneliti meneliti untuk lebih memfokuskan pada variabel yang mempengaruhinya yakni, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran dikarenakan perencanaan anggaran ini bisa membantu mengatasi masalah dan menganalisis

¹⁹ Fauziah, Tesis “*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju*”, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021), 41.

²⁰ Hugo Martinus Karubaba, Wahyu Widayat, Tesis “*Pengawasan Anggaran (Budgetary Control) Sebagai Strategi Pencegahan Distorsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Nabire)*”, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012), 7.

²¹ Fauziah, 42-43.

²² Andarias Patiran dan Melyanus Bonsapia, Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura), *Jurnal Ilmiah Ekonomi* (2018) : 19.

masa yang akan datang, dan pelaksanaan anggaran merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan, yang artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan, sedangkan pengawasan anggaran sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti juga mengambil fenomena yang terbaru yakni mengambil pada tahun ini lebih tepatnya pada tanggal 10 Juni 2022 dan fenomena tersebut hanya ada pada dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman kabupaten sampang.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang ?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang ?

3. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang ?
4. Apakah pengawasan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran apakah berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah perencanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengawasan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.²³ Sedangkan menurut penjelasan lain dijelaskan bahwa asumsi adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang diyakini benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya yang ditulis dalam bentuk pernyataan dan asumsi tidak harus ada.²⁴

Perencanaan anggaran di DPRKP sudah terlaksana dengan baik karena disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan organisasi dan dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.

Pelaksanaan anggaran di DPRKP sudah terlaksana dengan baik karena sudah dilaksanakan dengan tepat waktu, efektif, dan efisien. Dan juga sudah memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan anggaran di DPRKP sudah terlaksana dengan baik karena sudah melakukan evaluasi tentang rencana anggaran dan rencana kerja dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan kerja dengan rencana anggarannya, serta melakukan tindakan perbaikan apabila memang diperlukan.

²³ Abd. Mukhid, *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif*, (Surabaya : CV. Jakad media publishing, 2021), 60.

²⁴ Pinton Setia Mustafa, Hafidz Gusdiyanto, dkk, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas dalam pendidikan olahraga*, (Universitas Negeri Malang, Malang, 2020), 42.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sederhana terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.²⁵ Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₁: Ada pengaruh secara simultan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H₂ : Ada pengaruh secara parsial antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H₃ : Ada pengaruh secara parsial antara pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

H₄ : Ada pengaruh secara parsial antara pengawasan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

F. Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah pasti memiliki manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis dan praktisnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai pengaruh perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

a. Bagi Peneliti

²⁵ Sandu siyoto dan Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta : literasi media publishing, Juni 2015), 56.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi yang bermanfaat bagi perpustakaan IAIN MADURA dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sampang.

Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan suatu penyerapan anggaran dengan baik, sehingga bisa memungkinkan perusahaan untuk mencapai target yang lebih efektif dan juga bisa merealisasikan anggaran dalam periode tertentu.

G. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan cakupan dan prosedur analisis untuk mengetahui seberapa jauh cakupan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam pembahasan penelitian. Batasan penelitian mencakup hal-hal dibawah ini :

1. Ruang Lingkup Materi

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶ Dalam penelitian ini memfokuskan pada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel Bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan Variabel Terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.²⁷

Dalam penelitian ini perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran termasuk variabel independen (bebas) dan variabel penyerapan anggaran termasuk variabel dependen (terikat).

2. Ruang Lingkup Subjek

Pada pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada ruang lingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang dengan memfokuskan penelitian ini di pegawai yang terlibat secara langsung pada pengelolaan anggaran atau keuangan seperti Kasubag Program dan Keuangan.

²⁶ Made Indra dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019), 1.

²⁷ Ibid, 2-3.

H. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep atau variabel peneliti yang ada dalam judul penelitian.²⁸ Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Perencanaan Anggaran, Perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.²⁹

2. Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksana anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, untuk menghasilkan realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan.³⁰

3. Pengawasan Anggaran, Pengawasan anggaran merupakan suatu bentuk Tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.³¹

4. Penyerapan Anggaran, Penyerapan anggaran merupakan pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran).³²

²⁸Rheza vlova, *Penulisan Definisi Istilah Pada Skripsi*. 2017. <https://rhezavlova.blogspot.com/2017/09/penulisan-definisi-istilah-pada-skripsi.html?m=1>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 20.10.

²⁹ Ferdinan, dkk , Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 17, No.2, (Oktober 2020) : 121.

³⁰Vety Yuliani, Skripsi : “*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Triwulan IV Tahun 2019 Pada UPTD Puskesmas Di Kabupaten Tegal*”, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal, 2020), 21.

³¹ Hugo Martinus Karubaba, Wahyu Widayat, Tesis “*Pengawasan Anggaran (Budgetary Control) Sebagai Strategi Pencegahan Distorsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Nabire)*”, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012), 7.

5. DPRKP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.³³

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Pengujian pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen semacam ini telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu :

Penelitian pertama oleh Farhan Bayu Putra,dkk. melakukan penelitian tentang Pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran (studi pada OPD Provinsi Riau), dengan menggunakan metode survey dengan respondennya adalah kepala dinas/badan, bendahara pengeluaran dan kepala bagian di OPD Provinsi Riau. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di OPD Provinsi Riau. Semakin baik perencanaan anggaran, pencatatan administrasi dan

³² Ferdinan, dkk, 121.

³³<https://sampangkab.go.id/dinas-perumahan-rakyat-dan-kawasan-pemukiman/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pada pukul 9.24.

kompetensi sumber daya yang pada OPD Provinsi Riau akan menjadikan tingkat penyerapan anggarannya semakin baik pula.³⁴

Penelitian kedua oleh Yanuriza, dkk. melakukan penelitian tentang Pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, sumberdaya manusia, komitmen organisasi dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran PNBK kegiatan pengalaman objek vital pada satker jajaran Polda Riau, dengan menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan sampel proporsional dan transmisi sampel menggunakan tingkat kesalahan 5%. Hasil dari penelitian menunjukkan kesimpulan parsial yaitu lima variabel t (2.392; 3.109; 2.971; 2.038; dan 1.106). dengan hasil variabel yaitu perencanaan anggaran, catatan administrasi, sumberdaya manusia, komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran sedangkan variabel lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran dalam kegiatan Safeguard dari benda vital di Satker Kepolisian daerah Riau. Selain itu, dapat dilihat dari penentuan tes dimana nilai R sebesar 0,819 dan R^2 yang disesuaikan sebesar 0,624 atau 62,4% dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain.³⁵

Penelitian ketiga oleh Muhammad Gustavo Puluala melakukan penelitian tentang Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan

³⁴Farhan Bayu Putra, dkk, Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau), *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* Vol. 14, No. 2, (November 2021).

³⁵Yanuriza, dkk, *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumber daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau*. Vol. 27. 2019.

anggaran daerah (studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga), dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, jumlah sampel dalam penelitian adalah 124 pengelola anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga dengan teknik pengambilan sampel sensus. Kesimpulannya yaitu perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga.³⁶

Penelitian keempat oleh Fauziah melakukan penelitian tentang Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kesimpulannya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, kualitas sumber daya manusia

³⁶ Muhammad Gustavo Puluala, *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota SALATIGA)*, Vol. 1 No.1, Januari 2021.

berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.³⁷

Penelitian kelima oleh Icha Oktaviani melakukan penelitian tentang Pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran (studi pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif dan verifikatif sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bandung I. Kesimpulannya menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap penyerapan anggaran yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 39,3% sedangkan sisanya 60,7% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.³⁸

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

No.	Nama / Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Farhan Bayu Putra,dkk	a. Menggunakan variabel independen pencatatan administrasi dan kompetensi sumber daya manusia. b. Pada analisis data tidak menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.	a. Menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran. b. Pada analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. c. Menggunakan data primer dengan cara

³⁷ Fauziah, Tesis “*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju*”, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2021).

³⁸Icha Oktaviani, Skripsi : “*Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I)*”, (Bandung : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, 2020).

			menyebarkan kuesioner kepada responden.
2.	Yanuriza,dkk	<p>a. Menggunakan variabel independen pencatatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi dan lingkungan birokrasi.</p>	<p>a. Menggunakan variabel independen perencanaan anggaran.</p> <p>b. Menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran.</p> <p>c. Teknik pengambilan data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner.</p>
3.	Muhammad Gustavo Puluala	<p>a. Menggunakan variabel independen kualitas sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>b. Pengambilan sampel dengan teknik pengambilan sampel sensus.</p>	<p>a. Menggunakan variabel independen perencanaan dan pelaksanaan anggaran,</p> <p>b. Menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran.</p> <p>c. Menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.</p>
4.	Fauziah	<p>a. Menggunakan variabel independen kualitas sumber daya manusia.</p> <p>b. Tempat penelitiannya pada organisasi perangkat daerah kabupaten Mamuju.</p>	<p>a. Menggunakan variabel dependen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran.</p> <p>b. Menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran.</p> <p>c. Menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner.</p>
5.	Icha Oktaviani	<p>a. Tidak menggunakan variabel independen pengawasan anggaran.</p> <p>b. Pada analisis data</p>	<p>a. Menggunakan variabel independen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.</p>

		menggunakan uji instrument penelitian dan method of successive interval (MSI).	<ul style="list-style-type: none">b. Menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran.c. Pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan menyebarkan kuesioner.
--	--	--	--